



Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi

Mawar^{1*}; Arafat Yasir Mallapiseng²; Yudi Agusman³

^{1,2,3}Universitas Sembilanbelas November Kolaka

mawar202004@gmail.com*; afatpascaunm@gmail.com; yudiagusmanusn@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi serta mengetahui kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan terdiri atas Dinas PKP sebagai perangkat daerah pelaksana, Lurah Anaiwoi, dan masyarakat penerima bantuan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas PKP berperan sebagai modernisator dengan meningkatkan kualitas rumah dan infrastruktur permukiman; sebagai pelopor memberikan edukasi, pendampingan, dan mendorong partisipasi masyarakat; sedangkan sebagai pelaksana sendiri terlibat dalam pendataan, verifikasi, penetapan penerima, pengawasan, dan evaluasi. Meskipun sebagian besar output kegiatan tercapai, pengawasan pasca program belum optimal karena masih ditemukan kerusakan fasilitas dan laporan penjualan rumah bantuan. Kendala meliputi rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat pada tahap awal, perbedaan persepsi mengenai lokasi pembangunan, dan keterbatasan material yang sesuai dengan kondisi Kawasan pesisir.

Kata kunci: *Peran Pemerintah; Permukiman Kumuh; Program PPKT.*

Abstract

This study aims to examine the role of the Housing and Settlement Areas Office of Kolaka Regency in implementing the Integrated Slum Settlement Eradication Program (PPKT) in Kampung Bajo, Anaiwoi Urban Village, and to identify implementation constraints. The study employed a descriptive qualitative approach. Informants consisted of officials from the Housing and Settlement Areas Office, the Head of Anaiwoi Urban Village, and beneficiary communities. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that the Office acted as a modernizer by improving housing quality and settlement infrastructure, as a pioneer by providing education and assistance and encouraging community participation, and as a direct implementer through data collection, verification, beneficiary determination, supervision,

and evaluation. Although most outputs were achieved, post-program supervision was not yet optimal because facility damage and reports of houses being sold by some beneficiaries were still found. The main constraints were low initial community trust, different perceptions concerning the construction site, and limited availability of suitable materials for the coastal area.

Keywords: *Government Role; Slum Settlement; PPKT Program.*

Pendahuluan

Permukiman kumuh masih menjadi persoalan sosial dan lingkungan karena berkaitan dengan kualitas hunian, infrastruktur dasar, sanitasi, air minum, persampahan, serta kondisi lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, (2024) terdapat sekitar 3.373 Desa/Kelurahan yang masih memiliki Kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena kualitas hunian dan prasarana serta sarananya yang tidak memenuhi standar. Karakteristiknya mencakup kepadatan bangunan tinggi, ketidakteraturan bangunan, kualitas bangunan rendah, dan minimnya akses terhadap sarana serta prasarana dasar. Penduduk yang lahir di daerah kumuh menyebabkan standar hidup mereka tidak membaik dari waktu ke waktu. Permukiman kumuh seringkali ditandai oleh kondisi kebersihan yang buruk, yang dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat (Maulah & Manggalou, 2024)

Munculnya Kawasan permukiman kumuh tidak lepas dari berbagai faktor yang saling berhubungan (Ruli & Fadjarani, 2018). Faktor utama di balik keberadaan permukiman kumuh adalah kemiskinan, kurangnya akses ke tempat tinggal yang layak, termasuk perumahan dan infrastruktur, fasilitas umum (PSU), legalitas kepemilikan tanah sebagai bukti kepemilikan, serta tata kelola pemerintahan yang lemah dan kurang efektif (Carissa et al., 2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menempatkan penyediaan hunian dan lingkungan yang layak sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Karena itu, penanganan Kawasan kumuh membutuhkan intervensi pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keterlibatan

masyarakat dan keberlanjutan hasil pembangunan. Salah satu upaya penanganan tersebut adalah Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT).

Di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, program PPKT diarahkan untuk memperbaiki kondisi permukiman yang sebelumnya menghadapi masalah rumah tidak layak huni, keterbatasan infrastruktur, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan. Melalui program PPKT, pemerintah telah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam program ini, antara lain pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah, jalan lingkungan, jaringan air minum dan sambungan rumah, tangki septik komunal, serta TPS3R.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya dalam hal penyaluran bantuan perumahan. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah ditemukan fenomena penjualan dan penyewaan rumah bantuan oleh penerima kepada pihak lain. Padahal, rumah bantuan tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima dan tidak diperjualbelikan. Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan kemudahan dari pemerintah hanya dapat menyewakan atau mengalihkan kepemilikan rumah dalam hal pewarisan, setelah dihuni paling sedikit 5 tahun, atau pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keberlanjutan program dan komitmen penerima manfaat terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan perumahan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tetapi juga oleh mekanisme verifikasi penerima dan pengawasan pasca penyaluran (Sitorus et al., 2023).

Dalam penelitian ini, istilah pemerintah daerah merujuk pada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang direpresentasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Kabupaten Kolaka sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan PPKT. Dengan demikian, penelitian ini tidak menganalisis seluruh unsur pemerintah daerah, tetapi memfokuskan

analisis pada peran Dinas PKP sebagai perangkat daerah yang melaksanakan program. Penggunaan istilah pemerintah daerah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menempatkan Dinas PKP sebagai representasi pemerintah daerah pada bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pelaksana utama menjadi sangat penting untuk melakukan monitoring serta mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan Penelitian untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Siagian (1999). Dari lima bentuk peran yang dikemukakan Siagian, penelitian difokuskan pada tiga indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka, yaitu modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Fokus tersebut digunakan untuk melihat peran Dinas PKP dalam pelaksanaan PPKT sekaligus kendala yang dihadapi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran dan pemahaman terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan program berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling yang terdiri atas informan dari Dinas PKP Kabupaten Kolaka, pemerintah Kelurahan Anaiwoi, serta masyarakat penerima manfaat Program PPKT. Tiga teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang ketiganya saling melengkapi dalam menangkap kompleksitas makna dan dinamika kehidupan sosial yang menjadi objek

Penelitian. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap para informan yang terlibat dalam pelaksanaan Program sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan Program PPKT. Analisis data yang digunakan Adalah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Pettalongi et al., (2025) yang dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai peran Dinas PKP dalam pelaksanaan program serta kendala yang dihadapi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Analisis peran pemerintah mengacu pada teori peran pemerintah menurut Siagian, dengan memfokuskan pada tiga indikator, yaitu modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi

Program PPKT di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi diarahkan pada peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur dasar. Capaian kegiatan berdasarkan data evaluasi program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian kegiatan Program PPKT di Kampung Bajo

No.	Kegiatan PPKT	Target	Capaian/ Realisasi	Keterangan
1	Pembangunan Rumah Baru	118 Unit	118 unit	100% tercapai
2	Peningkatan Kualitas Rumah	122 Unit	122 unit	100% tercapai
3	Pembangunan Jalan Lingkungan	2.256,34 m	2.256 m	Hampir mencapai target
4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	2.502 m Jaringan	6.314 m	Melampaui target jaringan
5	Sambungan Rumah Air Minum	264 unit	264 unit	100% tercapai

6	Pembangunan Tangki Septik Komunal	37 unit	37 unit	100% tercapai
7	Pembangunan TPS3R	1 unit	1 unit	100% tercapai

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara output sebagian besar kegiatan mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menjadi dasar untuk melihat peran pemerintah dalam menghasilkan perubahan fisik dan sosial di kawasan penelitian.

Untuk melihat peran pemerintah daerah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan Program PPKT di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi, peneliti menggunakan teori Peran Pemerintah yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian yang indikatornya terdiri dari modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri.

a. Modernisator

Menurut Siagian S.P (1999), pemerintah sebagai modernisator memiliki peran dalam mendorong masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih maju melalui pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi, peran tersebut terlihat dari upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka dalam meningkatkan kualitas rumah dan lingkungan permukiman masyarakat. Pelaksanaan program tidak hanya diarahkan pada pembangunan rumah, tetapi juga mencakup penyediaan berbagai infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi Pembangunan Baru Rumah Swadaya, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, pembangunan jalan lingkungan, jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sambungan rumah air minum, tangki septik komunal, dan TPS3R. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap kondisi permukiman yang sebelumnya masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan PPKT menunjukkan capaian fisik yang cukup besar. Pembangunan Baru Rumah Swadaya terealisasi sebanyak 118 unit dari target 118 unit, sedangkan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya terealisasi sebanyak 122 unit dari target 122 unit. Pembangunan jalan lingkungan terealisasi sepanjang 2.256 meter dari target 2.256,34 meter. Pada penyediaan air minum, jaringan SPAM terealisasi sepanjang 6.314 meter dari target 2.502 meter dan

sambungan rumah air minum sebanyak 264 unit dari target 264 unit. Selain itu, pembangunan tangki septik komunal sebanyak 37 unit dan TPS3R sebanyak 1 unit juga terealisasi sesuai target. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa Dinas PKP telah melakukan pembangunan secara langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat di kawasan Kampung Bajo.

Perubahan kondisi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan. Masyarakat yang sebelumnya tinggal pada rumah dengan kondisi kurang layak, mengalami kebocoran, atau masih tinggal bersama beberapa kepala keluarga memperoleh rumah yang lebih layak setelah adanya program. Begitu pula masyarakat yang sebelumnya masih menumpang di rumah keluarga dapat memperoleh tempat tinggal sendiri melalui bantuan pembangunan rumah. Perubahan juga terlihat pada infrastruktur lingkungan, khususnya jalan yang sebelumnya menggunakan papan kemudian dibangun menjadi jalan beton sehingga akses masyarakat menjadi lebih baik. Penyediaan air minum, sanitasi, dan sarana persampahan juga menjadi bagian dari perubahan lingkungan permukiman. Dengan demikian, peran modernisator Dinas PKP tidak hanya menghasilkan bangunan secara fisik, tetapi memberikan perubahan terhadap kondisi tempat tinggal dan lingkungan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Penelitian Safitri et al., (2025) yang menemukan bahwa pelaksanaan PPKT di Kampung Bajo menghasilkan rumah layak huni serta peningkatan akses infrastruktur sehingga memberikan perubahan positif terhadap kondisi permukiman dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa program PPKT menghasilkan perbaikan jalan, rehabilitasi rumah, pembangunan rumah bantuan, serta fasilitas lainnya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa pemerintah melalui PPKT memiliki peran penting dalam mendorong perubahan fisik dan peningkatan kualitas permukiman Kampung Bajo.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sebagai modernisator belum sepenuhnya optimal karena keberhasilan pembangunan masih menghadapi persoalan pada tahap pemeliharaan. Beberapa masyarakat menyampaikan adanya fasilitas yang mulai mengalami kerusakan setelah program selesai, seperti bagian kayu rumah dan fasilitas jalan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan perlu diikuti dengan pemeliharaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya dituntut menghasilkan pembangunan baru, tetapi juga memastikan hasil pembangunan tetap dapat digunakan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dinas PKP telah menjalankan peran

sebagai modernisator melalui peningkatan kualitas rumah dan lingkungan permukiman, tetapi aspek keberlanjutan hasil pembangunan masih perlu diperkuat melalui pengawasan dan pemeliharaan pasca program.

b. Pelopor

Menurut Siagian S.P (1999), pemerintah sebagai pelopor berperan sebagai penggerak dalam pembangunan dengan memberikan contoh, arahan, pembinaan, dan dorongan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan PPKT di Kampung Bajo, peran Dinas PKP sebagai pelopor terlihat melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta penggerakan partisipasi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan berupa pembangunan fisik, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan ketentuan program. Hal tersebut penting karena masyarakat merupakan pihak yang menerima dan menggunakan hasil pembangunan sehingga perlu mengetahui hak dan tanggung jawabnya. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi, pemerintah berupaya membangun pemahaman masyarakat agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi PPKT dilakukan pada tahap awal sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan dan masyarakat penerima bantuan, sosialisasi dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut Dinas PKP menjelaskan mengenai keberadaan dan tujuan program, sasaran bantuan, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Masyarakat diberikan penjelasan bahwa program tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan kondisi rumah dan lingkungan permukiman, khususnya masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan program sehingga mereka mengetahui tahapan yang akan dilalui sebelum pembangunan dilakukan. Sosialisasi tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap program PPKT.

Selain sosialisasi, Dinas PKP juga memberikan edukasi mengenai aturan dan tanggung jawab penerima bantuan. Edukasi yang diberikan antara lain mengenai kewajiban menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya, menjaga rumah dan fasilitas yang telah dibangun, serta tidak merusak atau memperjualbelikan rumah bantuan. Masyarakat juga diarahkan untuk ikut menjaga fasilitas lingkungan karena fasilitas tersebut digunakan bersama dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Berdasarkan keterangan masyarakat, informasi mengenai tujuan bantuan

dan larangan menjual rumah telah disampaikan pada saat sosialisasi sebelum pembangunan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat juga mendapatkan arahan untuk ikut berpartisipasi melalui gotong royong, sedangkan fasilitator memberikan pendampingan dan pemantauan di lapangan. Dengan demikian, edukasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai program, tetapi juga mengenai sikap dan tanggung jawab masyarakat terhadap bantuan yang diterima.

Peran pelopor selanjutnya terlihat dari upaya Dinas PKP mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Pemerintah memberikan stimulus berupa material, sedangkan masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembangunan rumah yang akan mereka tempati. Keterlibatan masyarakat melalui gotong royong menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemerintah kelurahan juga membantu mengingatkan masyarakat melalui koordinasi dengan RT dan RW agar fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Temuan tersebut sejalan dengan Penelitian Yuliasari & Wijaya (2025) mengenai pelaksanaan PPKT di Desa Mojopilang. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator dalam mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi, serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa keberhasilan PPKT tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan dan menjaga hasil program.

Namun, hasil penelitian masih menemukan adanya laporan mengenai rumah bantuan yang diperjualbelikan dan beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan perlu dilanjutkan dengan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar masyarakat tetap memahami aturan serta menjaga hasil pembangunan. Dengan demikian, peran Dinas PKP sebagai pelopor telah dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan penggerakan partisipasi masyarakat, tetapi penguatan pembinaan pasca program masih diperlukan.

c. Pelaksana Sendiri

Menurut Siagian S.P (1999), pemerintah sebagai pelaksana sendiri menunjukkan keterlibatan pemerintah secara langsung dalam kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan

Program PPKT di Kampung Bajo, keterlibatan Dinas PKP dapat dilihat sejak tahap awal kegiatan sampai dengan evaluasi program. Dinas PKP tidak hanya berperan dalam menetapkan arah pelaksanaan program, tetapi juga terlibat dalam pendataan, verifikasi, penetapan penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, dan evaluasi. Keterlibatan tersebut dilakukan bersama pemerintah kelurahan dan masyarakat sebagai bagian dari proses pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPKT membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan program.

Pada tahap pendataan, pemerintah kelurahan melalui RT dan RW membantu mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan. Data masyarakat kemudian dikumpulkan dan dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, Dinas PKP melakukan verifikasi terhadap calon penerima dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan. Verifikasi tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi masyarakat dan kondisi rumah sebenarnya. Setelah proses verifikasi dilakukan, data calon penerima digunakan dalam proses seleksi dan penetapan penerima bantuan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa Dinas PKP memiliki keterlibatan langsung dalam memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan persyaratan program. Pada tahap pelaksanaan pembangunan, Dinas PKP melakukan pengawasan melalui fasilitator lapangan. Fasilitator melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembangunan, memberikan arahan kepada masyarakat, serta membantu menyampaikan apabila terdapat kendala selama proses pembangunan. Masyarakat juga menyampaikan bahwa pihak pendamping cukup sering datang ke lokasi untuk melihat perkembangan pembangunan dan memberikan arahan. Selain pengawasan di lapangan, Dinas PKP juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program melalui rapat dan pelaporan. Evaluasi tersebut digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai. Dengan adanya keterlibatan tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas PKP menjalankan fungsi pelaksana secara langsung, bukan hanya memberikan kebijakan atau bantuan dari tingkat administratif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Safitri et al., (2025) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan PPKT di Kampung Bajo dilakukan melalui tahapan prakonstruksi, konstruksi, serah terima, dan pascakonstruksi, termasuk sosialisasi, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pembentukan kelompok pemeliharaan dan pemanfaatan, serta pendampingan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Dinas PKP bersama pemerintah daerah terlibat dalam persiapan dokumen dan berbagai kebutuhan pelaksanaan program. Dengan

demikian, penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan pelaksanaan PPKT sangat bergantung pada keterlibatan langsung pemerintah dalam setiap tahapan program.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah masih memiliki kelemahan pada tahap setelah program selesai. Sebagian masyarakat menyampaikan bahwa pengawasan setelah pembangunan selesai sudah tidak sesering pada saat proses pembangunan berlangsung. Di sisi lain, ditemukan beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan dan terdapat laporan mengenai rumah bantuan yang diperjualbelikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan pengawasan selama program dengan pengawasan pasca program. Padahal, keberhasilan PPKT tidak hanya ditentukan oleh selesainya pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan hasil pembangunan tetap dimanfaatkan dan dipelihara sesuai dengan tujuan program. Oleh karena itu, Dinas PKP telah menjalankan peran sebagai pelaksana sendiri melalui pendataan, verifikasi, penetapan penerima, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, tetapi monitoring dan tindak lanjut setelah program selesai masih perlu ditingkatkan agar manfaat program dapat berkelanjutan.

Kesimpulan

Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan Program PPKT di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Sebagai modernisator, Dinas PKP meningkatkan kualitas rumah dan infrastruktur permukiman sehingga kondisi hunian dan lingkungan menjadi lebih layak. Sebagai pelopor, Dinas PKP memberikan edukasi, pendampingan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemeliharaan hasil program. Sebagai pelaksana sendiri, Dinas PKP terlibat langsung dalam pendataan, verifikasi, penetapan penerima, pengawasan, dan evaluasi. Kelemahan utama masih terdapat pada pengawasan pasca program yang belum optimal, ditandai dengan adanya kerusakan fasilitas dan laporan penjualan rumah bantuan. Adapun Kendala dalam pelaksanaan program ini meliputi rendahnya kepercayaan masyarakat pada tahap awal, perbedaan persepsi mengenai Lokasi pembangunan, dan keterbatasan material yang sesuai dengan kondisi pesisir.

Referensi

Carissa, S., Sukanto., dan Arisdyoto, I. (2024). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pontianak. *Jurnal Niara*, 16(3), 642–651. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18758>

- Maulah, N. S. dan, & Manggalou, S. (2024). Implementasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 5(3), 313–329. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i3.194>
- Pettalongi, S.S., Muas, Arafat, & Ndaomanu, D. N. (2025). Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN CAMPURAN: TEORI DAN PRAKTIK*. (Issue May).
- Ruli, A. dan, & Fadjarani, S. (2018). Media Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS LINGKUNGAN. *Jurnal Geografi*, 15(1), 56–67. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/index>
- Safitri, H. N., Mallapiseng, A., & Baso, S. (2025). Efektivitas Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1037>
- Sitorus, N. A., Putra, H. J. dan, & Wijaya, K. (2023). Evaluasi Efektifitas Penyaluran Program Perumahan Subsidi (Studi Kasus: Perumahan Rancaekek Permai 2 Bandung). *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 7(1), 158. <https://doi.org/10.31848/arcade.v7i1.1706>
- Statistik, B. P. (2024). Catalog : 1101001. In *Statistik Indonesia 2023: Vol. 53,2025*.
- Yuliasari, I. &, & Wijaya, D. (2025). Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun (2023-2025). *AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4419–4427. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1968%0Ahttp://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/1968/1061>
- Peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2011